

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafik.
- C.S.T. Kancil, 2003, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam.
- N.M. Spelt dan J.M.J.M. ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizina*, disunting oleh Philipus M.Hadjon Yuridika.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.
- Rachmani Puspita Dewi, 2005, *Hukum Perizinan*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Jurnal :

- Ade Irawan Taufik, "Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 215.
- Arif Lokobal, "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)", *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.4 No.2, September 2014, hlm 110.
- Andi Asnudin, "Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Di Indonesia" *Jurnal SMARTek*, Vol. 6, No. 4. Januari 2008, hlm. 12.

- Gatot Nursetyo, “Kajian Manajemen Risiko Bisnis Jasa Konstruksi”, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur (JTSA)*, Vol.8 No. 12.A, Desember 2010, hlm. 1.
- Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.
- Ivan Fauzi Raharja, “Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 2, Mei 2014, hlm 5.
- M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018, hlm 115.
- Nurwigati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, hlm 5.
- Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, 2009, hlm 118.
- Y. Sri Pudyatmoko, “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 No 4, Oktober 2007, hlm 4.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 35);

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 68).

Situs internet :

Berita Ekonomi Korporasi, *Republika* (Jakarta), 30 Oktober 2018, hlm. 1, kol 1-3.
Sekertaris Daerah Kulon Progo, Pembina Jasa Kontruksi, 31 Oktober 2018,
<http://setda.kulonprogokab.go.id/pages-33-pembinajasakantruksi.html> (08.00).